

**DAMPAK MEMBANGUN POLA PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Emmy Deseri¹ Yuliana²

- 1) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Sjakhyakirti Palembang
2) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email : emmydeseri63@gmail.com, yuli_72@yahoo.co.id

ABSTRAK

Selama ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sehingga kinerja maupun volume penyelenggaraan kediklatan sangat terbatas. Apalagi dengan kegiatan Asean Games tahun 2016- 2017 lalu, ditengah rendahnya kinerja dan minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan maka efisiensi anggaran adalah solusi yang paling akhir. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan sejak tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Sebelum menerapkan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas. Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam APBD Provinsi Sumsel terutama pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara. Sejak Pasca penerapan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, instansi vertikal yang ada di daerah, serta kementerian antara lain Kemenhum HAM, Kemenrisdiki, Mahkamah Agung serta pemerintah provinsi/kabupaten/ kota serta lembaga lainnya dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini merupakan peluang besar sekaligus sebagai tantangan dalam pengembangan PPK-BLUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Kata Kunci: BPSDMD, Pelatihan ASN, dan pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sehingga kinerja maupun volume

penyelenggaraan kediklatan sangat terbatas. Apalagi dengan kegiatan Asean Games tahun 2016- 2017 lalu, ditengah rendahnya kinerja dan minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan maka efisiensi anggaran adalah solusi yang paling akhir. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan sejak tahun 2018 sama sekali tidak ada

alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil kajian kongkrit untuk mendorong peningkatan Kinerja adalah melaksanakan Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah (PPK- BLUD) yang merupakan salah satu bentuk dari agenda reformasi di bidang keuangan Negara, khususnya pola penganggaran tradisional menuju pola penganggaran berbasis kinerja, dimana arah penggunaan keuangan tidak lagi berorientasi input tetapi berorientasi kepada output. Dengan keberaniannya Sumsel di tahun 2017 Penerapan PPK- BLUD dan berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dimana organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewirasahkan pemerintah (*enterprising the government*). Maka PPK- BLUD merupakan pengecualian (*Previllesse*) dalam pengelolaan keuangan pada umumnya yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Previllesse* atau pengecualian yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas kinerja yang sifatnya *non profit oriented*. Sehingga tidak semua perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dapat menerapkan PPK-BLUD, melainkan hanya organisasi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang

tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau dalam istilah yang lain disebut *Quasi Public Goods*, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, namun demikian sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*). Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Sebelum menerapkan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas. Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam APBD Provinsi Sumsel terutama pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa seorang ASN paling tidak mengikuti pendidikan pelatihan 25 jam pelajaran dalam satu tahun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang PNS paling tidak harus memiliki 3 kompetensi yakni, kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural, untuk mendapatkan kompetensi ini salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat eksplanasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengemukakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Adapun yang dijadikan alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini, bahwa dianggap lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan yang sebelumnya tidak terduga, selain itu peneliti juga bertugas dilingkungan tempat penelitian ini sebagai pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, dari segi biaya tidak memerlukan banyak dan dari segi waktu peneliti dapat secara langsung melakukan pengamatan dan dapat berhubungan langsung dengan informan, disamping itu pula metode kualitatif lebih peka terhadap segala pola perubahan nilai yang berlaku. Di dalam pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan, lebih menekankan pada Strategi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan

Fokus penelitian ini mengenai Strategi Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada (1) motivasi kerja, (2) kemampuan kerja, (3) suasana kerja, (4) lingkungan kerja, (5) perlengkapan dan fasilitas dan (6) prosedur kerja.

Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan.

Data penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang berperan dalam memberikan data dan informasi dalam lingkup penelitian dan sarana yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu Data Primer, dan Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi dilapangan terhadap obyek yang akan diteliti, observasi juga dimaksudkan untuk lebih mengetahui kondisi dilapangan secara mendalam dan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh obyek secara langsung dan nyata.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam (*indepth interview*). Dimana wawancara mendalam yaitu melakukan serangkaian tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka dan leluasa. Selanjutnya dalam penelitian ini dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan, hukum-hukum, pendapat-pendapat, dan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sesuai substansi penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* yaitu orang yang memiliki pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Adapun informan adalah sebagai berikut :

1. Implementor : Kepala Badan BPSDMD Provinsi Sumsel, Bagian Perencanaan, Kepala Keuangan .Kepada BPSDMD Kabupaten/Kota
2. Kelompok Sasaran : Kepada BPSDMD Kabupaten/Kota

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan strategi *Triangulasi*. Strategi *Triangulasi* diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dari studi kasus yang dilakukan sudah sesuai atau valid. Validitas proses penelitian dari studi kasus menjadi penting untuk menghindari hasil penelitian yang diragukan reliabilitasnya atau subjektifitas peneliti yang berlebihan.

Proses *Triangulasi* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Sumber. *Triangulasi* ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dilakukan dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti; (2) membandingkan pernyataan informan yang disampaikan di depan umum dengan yang apa yang disampaikan oleh informan tersebut secara pribadi; (3) membandingkan apa yang disampaikan oleh

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikan dalam kurun waktu tertentu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan pihak lain seperti pegawai yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan bagian umum dan perlengkapan. (5) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang mendukung atau berkaitan.

Teknik Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan mereduksi data yaitu proses pemilahan terhadap data yang diperoleh lapangan, dimana data yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah ditentukan dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan lain-lain dipilah serta diambil inti dari data tersebut untuk disesuaikan dengan keperluan peneliti, reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan itu dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat penandaan (*koding*) yang akhirnya mengadakan pemeriksaan kembali keabsahan hingga ke tahap penafsiran data. tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dan pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan, seperti analisis data yang dilakukan terhadap Strategi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kiprah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 s.d 2018 telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sebanyak 4.998 orang, yang meliputi pengembangan kompetensi teknis, fungsional, pemerintahan dan politik serta manajerial/kepemimpinan.

Pada Tahun 2014, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan diklat sebanyak 19 jenis diklat (22 angkatan) dengan total peserta berjumlah 810 orang, Tahun 2015 melaksanakan kegiatan diklat 17 jenis diklat (22 angkatan) dengan total jumlah peserta 884 orang dan pada Tahun 2016 melaksanakan 12 jenis diklat (18 angkatan) dengan total jumlah peserta 727 orang, Tahun 2017 melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta sebanyak 1308 orang dan Tahun 2018 melaksanakan kegiatan kediklatan dengan jumlah peserta diklat 1.269 orang.

Keberhasilan kebijakan berdampak bagi Stakeholder

Keberhasilan implementasi penerapan PPK-BLUD berdampak positif bagi stakeholder dalam hal ini BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat langsung digunakan tanpa harus masuk dulu dalam kas daerah.
2. *Flexible budget*, dalam pelaksanaan belanja BLUD dapat melampaui pagu yang telah ditetapkan.
3. BLUD dapat melakukan hutang/piutang, investasi, dan kerjasama atas persetujuan Gubernur.

4. Dalam pengadaan barang/jasa, dapat diberikan fleksibilitas sepanjang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses namun tetap dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.
5. BLUD dapat menghapus aset tidak tetap, aset-aset yang sudah tidak produktif atau sudah tidak efisien lagi, hasilnya merupakan pendapatan BLUD.
6. Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses dan efisiensi, namun penetapan tarif harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakatserta kompetisi yang sehat.

Keberhasilan kebijakan yang berdampak bagi individu

1. Pejabat pengelola BLUD pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi/ honorarium sesuai dengan tanggung jawab dan kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
2. Pejabat Pengelola *dan pegawai BLUD* dapat diangkat dari PNS dan non PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dengan meningkatnya prekwensi penyelenggaraan pelatihan maka terbuka kesempatan yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan kebijakan yang berdampak bagi kelompok

Keberhasilan kebijakan berdampak bagi kelompok apabila PPK - BLUD dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas bagi kelompok untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Pelayanan publik yang profesional setidaknya didasarkan pada akuntabilitas, dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) melalui penguatan pranata pelayanan dengan lebih mengedepankan efektivitas pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan.

REKOMENDASI

Penerapan PPK-BLUD tidak hanya sekedar mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan semata, tetapi kewenangan penerapan PPK-BLUD diberikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan, dengan tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kinerja BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, ^{Dun} direkomendasikan 3 hal sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan perubahan pola pikir (*mindset*) semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) terutama bagi pejabat

- pengelola Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai, hal ini sebagai upaya peningkatan daya saing BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme Widyaiswara sebagai tenaga pengajar pendidik dan pelatih (Dikjartih) secara berkesinambungan sebagai komponen utama dalam pelaksanaan pelatihan .
4. Perlunya meningkatkan sarana dan parasaram BLUD dalam melaksanakan Pola PPK – BLUD
5. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam meningkatkan target PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Atmosoeparto, 2000, *Manajemen SDM /Personil/Kepegawaian*, ElexMedia Komputindo, Jakarta
- Devis Keith dan Newstrom John, 1989. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahkan Agus Dama, Jakarta. Erlangga
- Willim N, 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan) Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington D.C. Cogresional Quarterly Pre